

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PADANG

Rizki Afri Mulia¹, Nika Saputra²

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIP Imam Bonjol, Padang

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti, Padang

rizkiafri_mulia@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the factors that affect the welfare of the people of the City of Padang measured using the Human Development Index consisting of: 1) To determine the effect of the Per Capita Gross Regional Domestic Product on the welfare of the people in the City of Padang. 2) To determine the effect of number of Poor in community welfare in Padang. 3) To determine the effect of Unemployment Rate on the welfare of people in the city of Padang. The research method used in this research is descriptive quantitative research method. The sampling technique in this study is total sampling. Data collection was performed using documentation and hypothesis testing techniques in this study using multiple linear regression test. Based on the results of the study note that: 1) The regression coefficient value of GDP per capita is equal to 0.0000002 with a probability of 0.001 which is smaller than 0.05. 2) The regression coefficient value of the number of poor population is 0.156 with a probability of 0.526 which is smaller than 0.05. 3) The regression coefficient value of the Open Unemployment Rate is -0,00014 with a probability of 0.117 less than 0.05. The conclusions that can be drawn are as follows: 1) Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a positive and significant effect on the welfare of the people in Padang City. 2) The number of poor people has no significant effect on the welfare of the people in the city of Padang. 3) Open Unemployment Rate has no negative and significant effect on the welfare of the people in Padang City.

Keywords : *Per capita Gross Regional Domestic Product, Number of Poor Population, Open Unemployment Rate.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari : 1) Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. 2) Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. 3) Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Nilai koefisien regresi PDRB Per Kapita adalah sebesar 0,0000002 dengan probabilitas sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. 2) Nilai koefisien regresi jumlah penduduk miskin sebesar 0,156 dengan probabilitas sebesar 0,526 yang lebih kecil dari 0,05. 3) Nilai koefisien regresi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah -0,00014 dengan probabilitas sebesar 0,117 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. 2) Jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. 3) Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Berdasarkan data BPS, masih terdapat sekitar 28 juta orang atau 10,8% penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan atau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Sumatera Barat berada pada posisi tiga terendah setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. (Statistik 2017) Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (Malik 2014)

Kota Padang merupakan salah satu bagian dari wilayah Republik Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kualitas manusia dalam suatu daerah yang berguna untuk memajukan daerah tersebut. Selain Kota Padang, Bukittinggi merupakan kota di Provinsi

Sumatera Barat yang berkembang pesat yang dapat digunakan sebagai pembanding dengan Padang.

Kualitas hidup masyarakat di suatu negara/daerah tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tabel 1 menunjukkan IPM Kota Padang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia. Pada tahun 2018 IPM Kota Padang tercatat sebesar 82,25 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia adalah 71,73 dan 71,39. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Kota Bukittinggi sebesar 80,11 pada tahun 2018. Tingginya IPM menunjukkan cukupnya pemerataan pembangunan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. (Statistik 2018)

Pembangunan ekonomi diantaranya bertujuan mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta berujung pada pengentasan kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan dimana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. (Bappenas and Tertinggal 2004) Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang sedang berupaya mengentaskan kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Jumlah penduduk miskin di Kota Padang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2004 sebanyak 31.800 jiwa sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 44.040 jiwa. Besar kecilnya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. (Indonesia Mencatat Tingkat Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah | Tagar n.d.) Peningkatan angka garis kemiskinan yang terjadi di Kota Padang membuat jumlah penduduk miskin semakin tinggi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita di Kota Padang selama 15 tahun yaitu tahun 2004-2018. Berdasarkan data yang diperoleh, angka PDRB Per Kapita mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu Rp14.620.524 pada tahun 2004 menjadi Rp53.424.520 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. (Siregar and Wahyuniarti 2007)

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), indikator kesejahteraan yang juga menunjukkan tingginya kesejahteraan di suatu negara atau daerah adalah indikator ketenagakerjaan yang tercermin pada turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tabel 4 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang secara keseluruhan turun naik dari 11,91% pada tahun 2004 menjadi 9,18% pada tahun 2018. Angka TPT tertinggi terjadi pada tahun 2007 dan 2011 sebesar 17,63% dan 16,3%, dimana pada tahun-tahun tersebut Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal tersebut sangat berdampak pada kota-kota di Indonesia termasuk Kota Padang.

Melihat beberapa indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang sebagaimana diuraikan di atas, maka menarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Padang” Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. 2) Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. 3) Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang.

TELAAH LITERATUR

Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat diatasi. Permasalahan permasalahan tersebut diantaranya kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal dan selanjutnya muncul pertanyaan bagaimana untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.(Todaro and Smith Stephen C. 2015)

Pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat, seperti pilihan untuk sehat, berpendidikan, dan kehidupan yang layak. Pembangunan manusia sebagai

proses partisipatif dan dinamis. Pembangunan manusia merupakan konsep yang sempurna dengan deskripsi pembangunan berkelanjutan.(Wijaya 2017) Manusia merupakan makhluk primer dan sarana utama dalam pembangunan. Ada 12 kategori dalam pembangunan manusia yaitu : IPM itu sendiri, kesejahteraan mental, pemberdayaan, kebebasan berpolitik, hubungan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, kondisi kerja, kondisi rekreasi, politik dan keamanan, keamanan ekonomi, kondisi lingkungan.(Ranis and Stewart 2002).

Konsep Kesejahteraan Sosial

Pada dekade 70 hingga 80-an pendekatan pembangunan di Indonesia lebih didominasi oleh upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Indikatornya adalah pencapaian pendapatan nasional bruto yaitu nilai total barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun. Namun ternyata pertumbuhan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama dari kalangan pemodal besar pelaku produksi barang dan jasa serta para elit yang dekat dengan akses sumber daya. Mekanisme tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan tidak terjadi.

Secara definitif, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu saja.(Chalid and Yusuf 2014) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.(R. Indonesia 2009)

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global.(Taslim 2004)

Indikator Kesejahteraan Sosial

Indikator yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengukur kondisi kesejahteraan sosial cukup beragam. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan

kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. (Suradi n.d.) IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). (Maratade 2016) Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. (Indonesi 2011) BPS mengukur kesejahteraan rakyat melalui delapan bidang, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya. (Statistik 2015)

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). (Nasikun 1996) Tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. (Statistik 2015)

Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. (Pambudi and Miyasto 2013) Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa

yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sukirno 2013) Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi dan peningkatan kerja yang nyata. Simon Kunet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB). (Sukirno 2013)

PDRB Per Kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di daerah. (Todaro and Smith Stephen C. 2015) BPS, menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah maka akan diperoleh angka PDRB Per Kapita. Secara sistematis, PDRB per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut: (Statistik 2015)

$$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB}{Penduduk \text{ Pertengahan Tahun}}$$

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari pembangunan, yang mana kemiskinan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa negara berkembang. Tingkat kemiskinan yang ada di rumah tangga atau keluarga umumnya berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan (Alsukri 2020), yang merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia sendiri, kemiskinan adalah masalah yang banyak dihadapi khususnya ketika pasca krisis ekonomi tahun 1998 (ERIKA 2015). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan

sekelompok orang. Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. (Mahendra 2016)

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Hendra Esmara mengukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga: 1. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. 2. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 3. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.

Indikator Kemiskinan

Banyak ukuran untuk menentukan angka kemiskinan, salah satunya ukuran yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. (S. Indonesia n.d.)

Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak atau garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan absolut. Selain BPS, UNDP dalam laporan Human Development Report 1997 memperkenalkan ukuran kemiskinan dimana ukuran kemiskinan disebut dengan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index-HPI*). Kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivation*), yaitu kehidupan (lebih dari 30 persen di negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari umur 40 tahun), pendidikan dasar (seperti diukur oleh presentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan penekanan pada

hilangnya hak pendidikan perempuan), serta keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan.(Antonio 2001)

Pengangguran

Definisi pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak berkerja tetapi sedang mencari perkerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi mulai bekerja. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.(Mankiw 2007) Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.(Muana 2005) Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan belum dapat memperolehnya.(Sadono 2010)

Batasan dari ILO (*Internasional Labour Office*) dalam *International Cenferece of Labour Statisticlans* yang diadakan padatahun 1994 tentang yang dimaksud dengan penganggur harus mencakup tiga aspek, yaitu tidak sedang bekerja, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan.(Konferensi tahunan ILO ke-100 memutuskan sekitar 53 hingga 100 juta pekerja rumah tangga di dunia terlindungi di bawah standar perburuhan n.d.) Untuk di Indonesia, bersedia menerima pekerjaan atau tambahan pekerjaan tidak dimasukan ke dalam konsep tentang penganggur dengan alasan mereka yang sedang mencari pekerjaan diasumsikan bersedia menerima pekerjaan.

Indikator kondisi ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK

mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi disuatu daerah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah Angkatan Kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Adapun formulasi untuk menghitung TPAK adalah :(Syahrin n.d.)

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Berbeda dengan TPAK, TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapat pekerjaan. Indikator ini dihitung dengan formulasi:(Statistik 2018)

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Sehingga TPT menunjukkan hasil yang lebih nyata untuk melihat tingkat pengangguran yang terjadi di suatu negara atau daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala yang ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan.(Sugiyono 2016) Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui atau mengukur keterkaitan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang.

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Didalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah data BPS periode tahun 2004-2018 dengan jumlah populasi sebesar 15 tahun.(Supomo 2014)

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.(Soekidjo Notoatmodjo 2010) Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi

yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 15 sampel.(Sugiyono 2016)

Peneliti menggunakan model analisis time series dan cross section. Data time series merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, misalnya data mingguan, data bulanan, data kuartalan, dan data tahunan. Data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Data panel merupakan gabungan antaradata time series dan data *cross section*.(Widarjono 2007) Alat analisis yang digunakan adalah multiple regression. Model linear digunakan dalam karena sebagian besar variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan hubungan linear dengan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Domestik Regional Bruto Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pada hasil uji statistik diperoleh bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil ini dilihat dari nilai signifikansi Produk Domestik Regional Bruto sebesar $0,001 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devani Ariestha Sari dengan hasil penelitian Secara parsial, variabel PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.(Sari 2016) Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah menyatakan bahwa Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif signifikan sebesar 10.29696 terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2014.(Rohmah 2017) Apabila PDRB naik, maka akan menyebabkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat juga akan naik, sehingga dengan naiknya pendapatan perkapita maka tingkat konsumsi juga ikut meningkat, dan pada akhirnya tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur akan meningkat.

Menurut Midgley, menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan penedekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi

tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. (Jaeni 2018)

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Mazumdar mengatakan bahwa pembangunan manusia berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, karena peningkatan pembangunan manusia akan menghasilkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada masa yang akan datang.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tidak Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pada hasil uji statistik diperoleh bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil ini dilihat dari nilai signifikansi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar $0,526 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H2) yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Indrasuara Luther Sirangi Si'lang, Zamruddin Hasid, Priyagus yang menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat. Tidak signifikannya pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap IPM disebabkan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat didominasi dari sektor pertanian yang mencapai 57 persen. (Si'lang, Hasid, and Priyagus 2019) Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf yang menyatakan bahwa Nilai t statistic untuk variable tingkat pengangguran $-1,985$ dengan nilai signifikansi $0,024 < 0,05$, berarti tingkat pengangguran berpengaruh nyata terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dengan level of significance (α) $0,05$. (Nursiah Chalid and Yusbar Yusuf 2014)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan dan mereka yang

sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sehingga penduduk yang menganggur akan kesulitan untuk mencapai kesejahteraan. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Jumlah Penduduk Miskin Tidak Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pada hasil uji statistik diperoleh bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Jumlah Penduduk Miskin terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil ini dilihat dari nilai signifikansi Jumlah Penduduk Miskin sebesar $0,526 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama (H3) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk Miskin mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stevenie Dhea dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan PDRB dan APBD Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. (Dhea 2019) Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tifa Kurnia Asih dengan hasil penelitian kemiskinan dan selisih kebutuhan layak hidup dan upah minimum kabupaten berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penduduk miskin menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan makanan. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan layak serta masalah yang terjadi pada selisih upah selain memberi jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidup, penetapan upah minimum masih mengalami kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu kesamaan upah di kabupaten/kota. (Asih 2018)

Menurut UNDP hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi terhambat.

Lanjouw, dkk. menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama

adalah tenaga kasarmereka.(Lanjouw et al. 2001) Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil empiris penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Padang Tahun 2004-2018, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi PDRB Per Kapita adalah sebesar 0,0000002 dengan probabilitas sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Berdasarkan uji koefisien determinasi, Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang sebesar 71,5%.
2. Nilai koefisien regresi jumlah penduduk miskin sebesar 0,156 dengan probabilitas sebesar 0,526 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Berdasarkan uji koefisien determinasi, jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang sebesar 31,7%.
3. Nilai koefisien regresi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah -0,00014 dengan probabilitas sebesar 0,117 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Berdasarkan uji koefisien determinasi, tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang sebesar 7,6%.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Asih, Tifa Kurnia. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah."
- Alsukri, S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kota Pekanbaru. *J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. Polit. dan Hummanioramaniora*, 4(1), 26.
- Bappenas, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus, and Panduan Pembangunan Klaster

- Industri Tertinggal. 2004. “Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi.”
- Chalid, Nursiah, and Yusbar Yusuf. 2014. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau.” *Jurnal ekonomi* 22(2): 1–12.
- Dhea, Stevenie. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau.”
- ERIKA, SILVIA. 2015. “ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, IPM DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATRA BARAT.”
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2011. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008.”
- “Indonesia Mencatat Tingkat Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah | Tagar.”
- Indonesia, Republik. 2009. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.” *Jakarta: Republik Indonesia*.
- Indonesia, Statistics. “Computation and Analysis of Macro Poverty of Indonesia 2016.”
- Jaeni, Jaeni. 2018. “ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, PDRB DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 1999-2016.”
- “Konferensi Tahunan ILO Ke-100 Memutuskan Sekitar 53 Hingga 100 Juta Pekerja Rumah Tangga Di Dunia Terlindungi Di Bawah Standar Perburuhan.”
- Lanjouw, Peter et al. 2001. *Poverty, Education, and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?* The World Bank.
- Mahendra, A. 2016. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Riset dan Akuntansi* 2(2): 123–48.
- Malik, Khalid. 2014. *Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*. United Nations Development Programme, New York.
- Mankiw, N Gregory. 2007. “Makroekonomi Edisi Keenam.” *Jakarta: Erlangga*.
- Maratade, Siske Yanti. 2016. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Tahun 2002-2013).” *Jurnal Berkala*

Ilmiah Efisiensi 16(1).

Muana, Nanga. 2005. "Makro Ekonomi, Teori, Masalah Dan Kebijakan, Edisi Kedua."

Nasikun. 1996. *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Nursiah Chalid, and Yusbar Yusuf. 2014. "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau." *Jurnal Ekonomi* 22(2): 1–12.

Pambudi, Eko Wicaksono, and Miyasto Miyasto. 2013. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)." *Diponegoro Journal of Economics*: 51–61.

Ranis, Gustav, and Frances Stewart. 2002. "Economic Growth and Human Development in Latin America."

Rohmah, Rina N U R. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014."

Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda.

Sari, Devani Ariestha. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bandarlampung."

Si'lang, Indrasuara Luther Sirangi, Zamruddin Hasid, and Priyagus Priyagus. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia." *JURNAL MANAJEMEN* 11(2): 159–69.

Siregar, Hermanto, and Dwi Wahyuniarti. 2007. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin." *IPB dan Brighten Institute. Bogor*.

Soekidjo Notoatmodjo, -. 2010. *Metodologi penelitian kesehatan*. Ed. rev. Jakarta: Rineka Cipta.

Statistik, Badan Pusat. 2015. "Indikator Kesejahteraan Rakyat." *BPS. Jakarta*.

———. 2017. "Indeks Pembangunan Manusia 2016." *Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik*.

———. 2018. "Statistik Tahunan." *Berbagai Tahun Penerbitan diakses Pada 27*.

Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2013. "Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga."

Supomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi & Manajemen)*. Yogyakarta: BPFE.

-
- Suradi, Suradi. “Pembangunan Manusia, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Nusa Tenggara Barat.” *Sosio Konsepsia*: 1–11.
- Syahrin, Muhammad Alfi. “Proyeksi Angkatan Kerja Di Kota Binjai Pada Tahun 2008 Berdasarkan Data Lima (5) Tahun Sebelumnya.”
- Taslim, Arifin. 2004. “Metode Kesejahteraan Masyarakat.” *IPB. Bogor*.
- Todaro, Michael P, and 1955- (author.) Smith Stephen C. 2015. *Economic Development*. Twelfth ed. Harlow, U.K. : Pearson.
- Widarjono, A. 2007. “Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis (Econometrics: Theory and Application for Economics and Bussiness.(2nd Edn) Yogyakarta: EKONISIA.”
- Wijaya, Hendra. 2017. “ANALISIS PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA.” *Coopetition* 8(1): 27.